

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam kehidupan beragama Buddha di Indonesia yang akan diungkap dalam penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah. Pertama, bentuk gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah; kedua fungsi gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah; dan ketiga makna gerakan keagamaan yang terjadi terhadap perkembangan Buddha *Dharma* di Indonesia. Penyelesaian ketiga rumusan masalah ini tergantung pada keakhuratan deskripsi konsep tentang gerakan keagamaan dan Majelis *Nichiren Shoshu*. Untuk menemukan benih-benih karakteristik kedua konsep ini merupakan titik sentral dari kajian pustaka, disamping juga untuk menentukan posisi penelitian disertasi ini diantara penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Untuk itu kajian pustaka dalam penelitian ini diawali dari penelusuran tentang gerakan keagamaan yang terjadi pada agama Buddha secara umum di dunia, selanjutnya dijelaskan tentang pergerakan sosial pada Majelis *Nichiren Shoshu* khususnya di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kedudukan, kesaling hubungan, persesuaian, dan kegunaan kedua konsep tersebut. Sehingga nantinya diharapkan dapat melahirkan gambaran yang lebih holistik dan komprehensif.

Studi ilmiah tentang gerakan keagamaan majelis *Nichiren Shoshu* dalam kehidupan beragama Buddha di Jawa Tengah belum pernah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa data sekunder yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini masih terbatas. Namun peneliti tetap berupaya untuk mengetengahkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis.

Salah satu penelitian gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis dilakukan oleh: Mark Macwilliams (2006:91-122) yang melakukan penelitian di

Amerika, yang berjudul *Techno-Ritualization The Gohonzon Controversy On The Internet*. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada dua organisasi besar yang berkembang di Amerika yakni *Nichiren Shoshu* dan *Soka Gakkai International*, dan bagi *Nichiren Shoshu*, *Gohonzon* adalah mandala pemujaan yang sangat penting sehingga tidak dibenarkan menggantikan mandala pemujaan dengan menggunakan *Gohonzon* yang dapat di sebarluaskan melalui internet, *Gohonzon is not just symbol, but is imbued with Nichiren's enlightened spirit*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, peneliti memandang telah terjadi gerakan keagamaan dalam praktik religiusitas pada masyarakat Buddhis di Amerika Serikat, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut sebab dan akibat dari gerakan keagamaan tersebut, melainkan hanya munculnya konflik ketika *mandala pemujaan* yang ada di altar yakni *Gohonzon* digantikan dengan media internet. *Technology has religious power because it can replicate the Gohonzon, internet Gohonzon are not hyperreal, floating signifiers either* (Macwilliams, 2006: 91-122). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Macwilliams ada beberapa hal: yang pertama subjek penelitian, pada penelitian ini subjeknya adalah umat Buddha pada Majelis *Nichiren Shoshu*, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan, subjeknya selain masyarakat Buddhis *Nichiren Shoshu* juga masyarakat Buddhis *Sokka Gakai*, jika penelitian yang dilakukan oleh Mark Macwilliams lebih spesifik pada penggunaan media internet untuk menggantikan mandala pemujaan *Gohonzon*, maka berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik meneliti tentang gerakan keagamaan umat Buddha. Meskipun sama-sama meneliti tentang *Nichiren Shoshu*, akan tetapi metode dan subjek penelitiannya berbeda, sehingga hasilnya juga pasti akan berbeda.

Penelitian lain mengenai gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis adalah penelitian dengan judul *The Buddhist Principles of Social Justice: an Application In Social Work Practice* oleh Khetjoi and Phra dari Mahamakut Buddhist University, Khonkean, Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap ajaran Buddha, Buddha selalu menentang adanya kelas, lebih lanjut dijelaskan bahwa kemurnian manusia tidak tergantung pada kelahiran, tetapi pada

tindakan yang dilakukan oleh individu, sehingga jelas bahwa perbedaan sosial adalah hal yang tidak perlu dalam mencapai *Nirwana*. Dasar dari jalan Buddha adalah pemahaman dan praktik moral terhadap orang lain (Khetjoi and Phra, 2017:167-181).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khetjoi dan Phra dengan penelitian ini ada beberapa hal, diantaranya: penelitian ini fokus pada pergerakan sosial yang dilakukan oleh Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha *Dharma*, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Khetjoi dan Phra lebih berfokus pada berbagai sumber kitab suci (*Tri Pitaka*) yang mengajarkan bagaimana seharusnya umat Buddha dalam menjalani hidup. Salah satu hal penting untuk dipraktikkan adalah penghilangan kelas sosial yang ada di masyarakat, karena pada dasarnya manusia terlahir tanpa kelas, serta atribut lain yang menempel pada individu.

Penelitian mengenai gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis pernah dilakukan oleh Camilla Orjuela yang melakukan penelitian dengan judul *Countering Buddhist Radicalisation: Emerging Peace Movements in Myanmar and Srilanka*. Hasil penelitian mengatakan bahwa umat Buddha radikal mulai bangkit dalam rangka gerakan nasionalis dan agitasi anti muslim di Asia Tenggara dan Selatan. Dengan adanya berbagai kekerasan yang terjadi, maka dilakukan kerja sama antara para tokoh agama, untuk mencegah adanya kebencian dan kekerasan. Gerakan masyarakat Buddhis pada dasarnya untuk mempertahankan status quo keunggulan Buddhis di Srilanka dan Myanmar (Orjuela, 2019:1-18).

Jika penelitian yang dilakukan oleh Orjuela lebih pada pergerakan masyarakat Buddhis dalam rangka mempertahankan status quo keunggulan Buddhis, berbeda dengan penelitian ini, yakni lebih spesifik pada gerakan keagamaan masyarakat Buddhis, khususnya pada Majelis *Nichiren Shoshu* yang ada di Jawa Tengah. Dimana gerakan keagamaan yang terjadi bukan karena adanya ancaman dari pihak luar, tetapi justru gerakan keagamaan yang dilakukan untuk membangun identitas Majelis *Nichiren Shoshu* sebagai bagian agama Buddha di Indonesia.

Penelitian tentang gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis juga pernah dilakukan oleh K.B.G. Shantha Kumara Gamlath

(2016:18-30). Penelitian yang dilakukan oleh Gamlath dengan judul “*Social Movements, Power Politics and Politicization of Buddhist Priests in Sri Lanka*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi dan budaya dasar menyebabkan komunitas *Sangha* termotivasi untuk campur tangan dalam politik praktis. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pada awalnya *Sangha* yang tidak memiliki urusan dengan politik, tugasnya lebih pada urusan tata ritual dan religiusitas, melakukan sebuah gerakan keagamaan yakni terjun dalam politik praktis. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya dasar.

Jika penelitian yang dilakukan oleh Gamlath secara spesifik pada anggota *sangha* yang melakukan gerakan sosial, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, yakni lebih fokus pada gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Majelis. Sehingga bukan hanya anggota *Sangha*, tetapi menyangkut umat atau pemeluk agama, anggota *Sangha* serta para pengurus organisasi atau Majelis *Nichiren Shoshu* itu sendiri.

Penelitian lain, terkait gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis juga pernah dilakukan oleh Ladwig and James, 2014 dalam jurnal *Politics, Religion and Ideology*. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi di negara-negara Asia, mengakibatkan para pemimpin dan lembaga keagamaan bereaksi terhadap tekanan modernisasi. Sehingga sejak sekitar tahun 1950-1970 orang berupaya menggabungkan agama Buddha dengan ide-ide dan praktik sosialis pada negara-negara mayoritas Buddhis.

Bentuk gerakan yang dilakukan oleh Majelis *Nichiren Shoshu* dalam penelitian ini berbeda dengan gerakan keagamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Ladwig. Gerakan keagamaan yang diteliti oleh Ladwig bersifat universal, bukan hanya pada satu negara saja, tetapi pada beberapa negara Buddhis di Asia, pergerakannya berupa aksi protes dan perubahan pola perilaku pemeluk agama Buddha terhadap modernisasi. Sedangkan gerakan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis pada Majelis *Nichiren Shoshu* lebih pada sebuah usaha untuk mempertahankan diri dari arus perubahan yang terjadi di Indonesia.

Gambaran dari hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang gerakan keagamaan pada masyarakat Buddhis khususnya pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah, masih sangat relevan dan penting. Karena dapat digunakan untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan terdahulu. Disamping substansi materialnya, juga penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu berdasarkan pendekatan, karena penelitian ini dilakukan dalam khazanah kajian budaya. Artinya penelitian ini menempatkan kebudayaan sebagai pusat kajian dalam kaitannya dengan fungsi kebudayaan dalam memberikan bentuk historis pada struktur sosial. Dalam hal ini agama sebagai sistem keyakinan dijadikan inti dari sistem nilai dalam kebudayaan, tetapi dalam dunia praksis sosial melahirkan praktik agama yang beragam sesuai dengan pluralisasi nilai, norma dan makna yang menyertainya.

Fenomena di atas sejalan dengan karakteristik dan ide dasar kajian budaya dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang menampilkan praktik sosial diluar struktur sosial yang mapan. Bidang ilmu kajian budaya memberikan perhatian pada narasi kecil seperti marginalisasi tradisi, multikultur, identitas, etnisitas dan lokalitas (Sukarma, 2012:32). Dalam kaitannya dengan gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam kehidupan beragama Buddha di Indonesia, diasumsikan terjadi proses gerakan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis pemeluk Majelis *Nichiren Shoshu*. Gerakan keagamaan berlangsung melalui mekanisme penghancuran (Dekonstruksi), pembangunan (Strukturasi), dan penguatan kembali (Restrukturasi). Proses tersebut mengandaikan bahwa agama Buddha yang berkembang dalam hal ini adalah Majelis *Nichiren Shoshu* berada dalam manipulasi kebutuhan dan improvisasi perubahan. Hal ini tentunya memiliki kebenaran atau kerangka epistemologi sendiri.

Kebenaran yang dimaksud, adalah kebenaran situasional yang dialami Majelis *Nichiren Shoshu* yang dapat diklasifikasikan sebagai kelompok budaya marginal. Disebut sebagai marginal karena didalamnya terjadi pengalihan kesadaran yang cenderung berlawanan dengan struktur budaya yang sudah mapan (dalam hal ini adalah budaya yang dimiliki majelis agama Buddha secara umum

dan WALUBI sebagai wadah organisasi keagamaan Buddha yang ada di Indonesia). Kebenaran kelompok Majelis *Nichiren Shoshu* ini termasuk dalam kategori kelompok kepentingan yang harus diperjuangkan oleh kajian budaya.

Berdasarkan kajian pustaka, atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang, maka dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul “Gerakan Keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam Kesetaraan Kehidupan Beragama Buddha di Jawa Tengah” layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga nantinya diharapkan mampu membawa perubahan baik terhadap perkembangan agama Buddha di Jawa Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

B. Konsep

Penelitian ini dipusatkan pada gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam kesetaraan kehidupan beragama Buddha di Indonesia, dengan fokus tempat penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa konsep penelitian ini terdiri dari dua konsep utama, yakni gerakan keagamaan dan Majelis *Nichiren Shoshu*. Gerakan keagamaan merupakan objek formal yang digunakan untuk menjelaskan objek material, yakni Majelis *Nichiren Shoshu*. Selanjutnya kedua konsep tersebut akan dijelaskan lebih operasional lagi, hal ini penting untuk melihat kategori pengetahuan yang hendak dibangun. Selanjutnya kedua konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Gerakan Keagamaan

Guna membahas tentang gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam kehidupan beragama Buddha di Indonesia, pertama akan dijelaskan mengenai konsep gerakan keagamaan. Konsep gerakan keagamaan terdiri dari dua unsur, yakni gerakan dan keagamaan. Gerakan atau *movement* dalam (vobulary.com diakses tanggal 06 Desember 2020) diartikan sebagai “*a series of actions advancing a principle or tending toward a particular and*”. Yang dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang memajukan suatu prinsip atau cenderung menuju tujuan tertentu. Diartikan sama dengan

pergerakan, yakni usaha atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan sebagainya) dengan tujuan untuk perjuangan atau perbaikan.

Keagamaan atau religious dalam vocabulary.com (diakses tanggal 6 Desember 2020) diartikan sebagai “*concerned with sacred matters or religion or the church*” yakni sikap peduli dengan hal-hal yang sakral atau agama. Gerakan keagamaan merupakan bagian dari pergerakan sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada (Octaviani, 2015:228-240). Artinya gerakan sosial lahir karena adanya reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Dengan begitu gerakan keagamaan merupakan tindakan terencana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat beragama yang ditujukan pada suatu perubahan tertentu pada lembaga keagamaan.

Social Movement diartikan sebagai: “*a group diffusely organized people or organizations striving toward a common goal relating to human society or social change, or the organized activities of such a group*” yang kurang lebih memiliki arti sekelompok orang atau organisasi yang secara terorganisir berjuang bersama menuju perubahan sosial yang menjadi tujuan bersama (Daintith, 2005: 782).

Gerakan sosial diartikan juga sebagai hasil perilaku kolektif yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok masyarakat secara bersama-sama, adapun perilaku yang dimaksud adalah hasil tanggapan atau respons terhadap adanya rangsangan tertentu bisa berupa rangsangan dalam aspek politik, ekonomi dan aspek lainnya. Lebih lanjut (Martono, 2012:26) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pergerakan politik adalah suatu persatuan sosial sejumlah orang yang bersatu untuk menghambat maupun mendorong segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat.

Lebih lanjut Giddens (Burhani, 2001:27) menjelaskan bahwa gerakan sosial berbeda dengan perilaku kolektif. Letak perbedaannya pada sifatnya,

yakni perilaku kolektif bersifat spontan dan tidak memerlukan proses pengorganisasian massa. Berbeda dengan gerakan sosial yang sifatnya lebih terorganisir dan memiliki tujuan serta kepentingan bersama. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pergerakan sosial terjadi dikarenakan ada tujuan tertentu yang akan diwujudkan oleh sekelompok orang secara kolektif.

Senada yang disampaikan oleh Giddens, (Tarrow, 1998:4) menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi berkelanjutan dengan para pemuka, penentang dan pemegang wewenang. Sehingga dapat dikatakan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang memiliki sifat menentang karena memperjuangkan tujuan kolektif. Kolektif disini dapat dikatakan bahwa gerakan sosial memiliki partisipan yang sangat banyak, bahkan sampai dengan jutaan orang. Pergerakan sosial dapat beroperasi pada batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun juga bisa bergerak secara ilegal (Suharko, 2006:3). Gerakan sosial juga diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengubah suatu keadaan atau melawan ketidakadilan (Nurmaria, 2017:407-422). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah usaha mengubah keadaan. Dalam penelitian ini gerakan sosial keagamaan dilakukan karena keadaan Majelis *Nichiren Shoshu* yang dianggap sebagai agama sesat dan dikeluarkan dari WALUBI

Dewasa ini para sosiolog di barat khususnya di Amerika, menjadikan gerakan sosial sebagai topik bahasan yang populer, banyak studi yang telah dilakukan mengenai gerakan hak-hak sipil dikalangan kulit hitam yang tinggal di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1950-1960-an. Gerakan yang dikaji meliputi gerakan lingkungan hidup, gerakan perdamaian dan gerakan solidaritas maupun gerakan perempuan di tahun 1970an. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai pendekatan dan teori baru tentang gerakan sosial (Akbar, 2016:107-115). Gerakan sosial yang paling sering dipilih sebagai bahan kajian adalah gerakan perjuangan etnis atau Nasionalis dinegara-negara bagian Uni Soviet, gerakan anti Apartheid di Afrika Selatan,

serta gerakan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup atau pemerataan distribusi sumberdaya ekonomi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa gerakan memerangi kemiskinan yang dilakukan di Amerika Serikat pada awal tahun 1960an, memiliki pengaruh yang besar terhadap iklim pembaharuan. Dijelaskan oleh (Ritrzer dan Goodman, 2003:63) dalam (Fitri dan Idil, 2017:83-101) bahwa program memerangi kemiskinan yang terjadi di Amerika Serikat merupakan cara khas strategi masyarakat modern yang memiliki keyakinan bahwa dapat ditemukan serta diterapkan penyelesaian rasional atas masalah kemiskinan.

Gerakan sosial pada dasarnya bukan hal baru, di Indonesia gerakan sosial dibedakan berdasarkan masanya, yaitu masa kolonial, masa orde lama, masa orde baru dan masa transisi atau reformasi (Rahmawati, 2003:329-358). Dijelaskan bahwa pada masa kolonial gerakan sosial yang muncul di Indonesia bersifat parsial dengan mengedepankan ide-ide mesianistik. Sedangkan pada masa orde lama gerakan sosial yang muncul berkaitan dengan intervensi partai politik yang *memblow-out* masalah tanah sebagai isu kepentingan partai. Dan untuk masa orde baru gerakan sosial yang muncul lebih bersifat vertikal antara pemegang hak dan pengusaha yang bekerjasama dengan penguasa (pemerintah). Untuk gerakan sosial yang terjadi pada masa reformasi atau transisi lebih bersifat terbuka (Izudin, 2017:241-260).

Sebelumnya perkembangan studi tentang gerakan sosial sudah dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif. Yakni menurut (Singh, 2010:111), gerakan sosial dibedakan menjadi:

- a. Klasik (*Classical*)
- b. Neo Klasik (*The Neo Classical*)
- c. Kontemporer (*Contemporary*)

Gerakan sosial perspektif klasik terdiri dari studi tentang perilaku kolektif dari kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riof*) dan kelompok pemberontakan (*rebel groups*). Gerakan sosial ini telah diteliti oleh para ahli sosiolog barat sebelum tahun 1950an. Sedangkan untuk neo klasik

merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Dikenal juga dengan gerakan sosial lama. Gerakan kontemporer dikenal juga dengan istilah gerakan sosial baru, muncul di Amerika dan Eropa pada sekitar tahun 1960an-1970an.

Gerakan sosial lahir karena adanya ketidak puasan sekelompok masyarakat terhadap sebuah kondisi atau keadaan karena adanya dominasi penguasa (Kamaruddin, 2012:19-35). Pada awalnya kelompok yang tidak puas tersebut tidak terarah, tidak terorganisir serta tidak memiliki perencanaan yang matang. Lambat namun pasti orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut saling berkeluh kesah membagi suka dan duka, fase selanjutnya mengalami penurunan kegiatan karena tidak ada dampak bagi kehidupan anggota kelompok tersebut. Selanjutnya hal tersebut mengakibatkan seluruh anggota kelompok untuk berubah haluan dengan menciptakan organisasi permanen.

Gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah tindakan atau agitasi yang terencana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Yakni tindakan yang disertai dengan program yang menunjukkan adanya cita-cita atau tujuan pada suatu perubahan, yaitu perubahan sebagai bentuk perlawanan atas dominasi struktur sosial (Mahardika, 2000:18-20). Senada dengan yang disampaikan oleh Mahardika, bahwa gerakan sosial harus memenuhi 4 (empat) kriteria: pertama adanya kolektifitas, kedua memiliki tujuan bersama yaitu tujuan untuk mewujudkan perubahan tertentu dalam masyarakat, ketiga kolektivitasnya relative tersebar namun begitu derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan organisasi formal, dan ke empat tindakannya memiliki derajat spontanitas tinggi namun tidak terlembaga dan bentuknya tidak konvensional (Martono, 2011:225).

Secara umum gerakan sosial diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis pergerakan sosial didasarkan pada beberapa kriteria, diantaranya: (1) menurut bidang perubahan yang diinginkan, (2) menurut kualitas perubahan yang diinginkan, (3) Menurut target perubahan, (4) menurut arah perubahan yang

diinginkan, (5) menurut strategi yang melandasi tindakan dan ke (6) menurut sejarah perkembangan pergerakan itu sendiri (Rahman, 2016:175-184).

Organisasi gerakan sosial oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani (2006:145) digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu (1) organisasi gerakan sosial profesional yaitu organisasi yang tidak menjadi bagian dari masyarakat korban sehingga organisasi ini memiliki sifat profesional. Bersifat profesional dikarenakan terdapat struktur formal dan sistem manajemen yang memiliki kelebihan dalam hal teknis untuk memenuhi keperluan gerakan. Dalam hal ini ciri-ciri tersebut dimiliki oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sedangkan golongan yang ke (2) adalah organisasi gerakan sosial partisipatif, yakni merupakan bagian dari masyarakat korban. Golongan ini tidak memiliki unsur profesional seperti golongan yang pertama, juga tidak terdapat struktur formal dan manajemen. Sebagai contohnya adalah gerakan sosial berupa organisasi protes massa, kelompok buruh, kelompok tani, nelayan dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pergerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang terjadi dalam beberapa aspek kehidupan yang berbeda. Yakni pergerakan sosial dalam bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan. Lebih lanjut (Mufid, 2006:33) menyatakan bahwa pergerakan sosial keagamaan merupakan hasil perilaku kolektif yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatas namakan ajaran agama, serta merupakan stimulus berupa rangsangan yang berkaitan dengan kesadaran beragama.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pergerakan sosial keagamaan merupakan dinamika keagamaan pada masyarakat agamis, yang terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat sebagai pemeluk agama. Semakin beragam agama yang dianut oleh masyarakat maka semakin beragam pula bentuk, strategi, dan orientasi pergerakan sosial yang dilakukan (Kusmanto, 2017:84). Sehingga mengakibatkan adanya

benturan atau justru penyatuan dari persamaan atau perbedaan yang melekat, lebih lanjut dijelaskan bahwa klaim kebenaran sangat menentukan dinamika gerakan sosial keagamaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gerakan sosial keagamaan merupakan sebuah usaha kolektif yang terorganisasi dari pemeluk agama dalam rangka merespons realitas sosial keagamaan dalam hubungannya dengan dua pilihan yaitu mempertahankan nilai-nilai dan keyakinan yang ada atau justru sebaliknya merubah nilai-nilai tersebut. Pergerakan sosial muncul dikarenakan adanya ketimpangan atau kesenjangan sosial.

Gerakan keagamaan, merupakan bukti bahwa agama merupakan bentuk dari kebudayaan yang berjalan dengan sangat dinamis, sehingga memunculkan bentuk-bentuk pembaharuan. Jack David Eller dalam bukunya yang berjudul *Introducing Anthropoloy of Religion* menyebutkan, bahwa ada tujuh karakteristik agama baru pada model beragama yang baru di Jepang. Tujuh karakteristik tersebut meliputi: (1) Kepemimpinan Karismatik, dengan pendiri atau nabi yang mengklaim atau diberkahi dengan kekuatan supranatural, (2) Tujuan Konkret, yakni program yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu atau kolektif, termasuk didalamnya kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kekayaan, (3) Identifikasi Masyarakat, yakni sering merekrut masyarakat yang putus asa, kesepian dan tertindas, kemudian membentuk mereka menjadi kelompok baru, (4) Organisasi yang sangat sentralistik, terkontrol dan tidak demokratis, (5) proyek-proyek pembangunan yang ambisius, seperti terciptanya markas bagi gerakan, (6) Dilakukannya kegiatan massal, tidak sedikit yang ditujukan untuk dakwah, (7) adanya sinkretisme, misteri dan kebaruan seperti kepemilikan wahyu khusus (Panjalu, 2018:5).

Gerakan sosial keagamaan disebut juga dengan *Revitalisasi* atau *millenarian*. (Sanderson, 2000:532-534) menjelaskan bahwa gerakan sosial keagamaan muncul karena adanya kondisi ketegangan atau krisis sosial ekstrim, dalam masa perubahan sosial yang cepat ketika orang-orang terbangun dan mengalami disorientasi dari pola hidup tradisional, ketika

kebudayaan pribumi diubah oleh kolonialisme, perang atau invasi kebudayaan asing atau ketika penindasan dan eksploitasi mencapai batas-batas yang tidak dapat ditolelir.

Gerakan sosial keagamaan menurut Aberle dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu: (1) *Alternatif Movement*, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang, (2) *Redemptive movement*, gerakan yang bertujuan agar terjadi perubahan secara menyeluruh pada perilaku seseorang, (3) *Reformatif Movement*, yakni gerakan yang bertujuan untuk merubah masyarakat namun dalam ruang lingkup tertentu, dan (4) *Transformatif Movement*, yaitu gerakan yang bertujuan untuk merubah masyarakat secara menyeluruh (Faqih, 2011:100-101).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gerakan sosial keagamaan pada penelitian ini adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah dengan tujuan untuk menyetarakan kedudukan majelis *Nichiren Shoshu* dengan Majelis keagamaan Buddha lainnya, selain itu juga untuk membangun identitas Majelis yang selama ini sempat dianggap sebagai agama yang sesat adapun tindakan yang dilakukan oleh Majelis *Nichiren Shoshu* nantinya dapat dijelaskan dalam bentuk-bentuk gerakan keagamaan pada bab IV Disertasi ini.

2. Agama Buddha dan Majelis *Nichiren Shoshu*

Majelis *Nichiren Shoshu* merupakan salah satu majelis keagamaan Buddha yang berkembang di Indonesia. Sebelum dijelaskan secara lebih terperinci mengenai majelis *Nichiren Shoshu*, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai agama.

a. Agama

Semenjak adanya kepercayaan manusia terhadap kekuatan diluar diri manusia sendiri, yakni lahirnya animisme dan dinamisme sampai lahirnya berbagai jenis agama di dunia ini sehingga manusia disebut

sebagai makhluk religius (Albright and Ashbrook, 2001:13). Pada akhirnya agama menjadi kekuatan sosial yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sosial (Emmons dalam Fridayanti, 2015:199).

Agama berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “A” yang berarti tidak dan “Gama” yang berarti Kacau (Ismail, 1997:28) berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa agama pada dasarnya merupakan sebuah aturan ataupun nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia, bukan hanya mengatur akan hal-hal yang bersifat gaib, tetapi juga mengenai moralitas, budi pekerti dan kehidupan sosial, yang mengatur bagaimana hidup bermasyarakat, menghargai dan menghormati orang lain, sehingga apapun agama yang ada di dunia ini semua mengajarkan tentang kebaikan.

Agama menurut Tylor (Pals, 2012:41) adalah keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. Menurut Tylor semua agama memiliki karakteristik yang hampir sama, yakni adanya keyakinan akan adanya roh-roh yang berpikir, berperilaku dan berperasaan seperti manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa esensi dari setiap agama, seperti halnya mitologi adalah animisme, yaitu sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang hidup dan punya kekuatan yang ada dibalik segala sesuatu.

Agama menurut Daradjat (2005:10) adalah proses relasi manusia dengan sesuatu yang diyakini dan lebih tinggi kedudukan dan kekuatannya dibandingkan dengan manusia, dalam hal ini manusia menyebutnya sebagai Tuhan atau Dewa-Dewi. Dimana manusia yang beragama meyakini bahwa ada kekuatan diluar kekuatan manusia yang memiliki kemampuan untuk mengatur alam dan segala isinya. Lebih lanjut mengenai definisi agama menurut Geertz (1992:5) adalah sebagai berikut.

Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus

konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis.

Freud menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan bukanlah sebuah delusi, agama adalah ilusi. Oleh karena itu ajaran agama bukanlah wahyu dari Tuhan serta bukan juga konklusi logis yang berasal dari pembuktian ilmiah, ajaran agama merupakan pemenuhan bagi keinginan manusia yang paling tua, paling kuat dan paling penting, rahasia agama berada pada kuatnya keinginan para pemeluk agama sendiri (Freud, 1961:30). Sedangkan Durkheim menyatakan bahwa agama merupakan sesuatu yang amat bersifat sosial, merupakan bagian yang paling berharga dari seluruh kehidupan sosial, agama melayani kehidupan masyarakat dengan menyediakan ide, ritual serta perasaan yang akan menuntun manusia dalam hidup bermasyarakat (Pals, 2012:164).

Istilah agama yang bermacam-macam tersebut, akhirnya memunculkan istilah religiusitas. Religi merupakan bagian dari kebudayaan (Simanjuntak, 2016:7). Religi sebagai salah satu unsur universal, muncul karena manusia percaya pada suatu kekuatan lain atau gaib yang dianggap lebih tinggi dari manusia itu sendiri, kemudian manusia berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan yang dianggap gaib tersebut (Koentjaraningrat, 2015:294). Adapun unsur religi ada 5, yakni emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, peralatan ritus dan upacara serta umat yang menganut religi tersebut (Koentjaraningrat, 2014:80).

Mengenai sistem keyakinan menyangkut pula sistem nilai dan sistem norma keagamaan, serta ajaran kesusilaan yang mengatur tingkah laku manusia. Dalam agama Buddha dikenal istilah *Saddha* adalah iman atau kepercayaan yang mendasarkan kebijaksanaan, yakni meyakini *Dharma* (Ajaran Buddha) sebagai kebenaran mutlak, bukan meyakini *Dharma* sebagai sesuatu yang masih diragukan atau samar-samar (Mukti, 2003:29). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *Saddha* mengandung 3 unsur,

yakni: (1) keyakinan yang kuat terhadap sesuatu hal, (2) Kegembiraan yang mendalam terhadap sifat-sifat baik dan (3) harapan untuk memperoleh sesuatu dikemudian hari (Widyadharma, 1989:12-13). Keyakinan yang kuat bukan berarti sebatas percaya seperti yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, bukan percaya yang membabi buta, melainkan percaya dengan penuh keyakinan yang menekankan pada aspek melihat, mengetahui dan memahami, yang dalam agama Buddha dikenal dengan istilah *Ehipassiko*, yakni untuk percaya terhadap sesuatu termasuk *Dharma* ajaran Buddha, seseorang hendaknya datang, melihat, dan membuktikan sendiri kebenaran *Dharma*.

Sila dalam agama Buddha merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran Buddha. *Sila* berasal dari bahasa Pali yang memiliki beberapa arti, Yakni: (1) sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan dan (2) latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik (Rashid, 1996: 3). Berdasarkan pengertian tentang *Sila* tersebut, dapat dijelaskan bahwa *Sila* memiliki pengertian yang luas, sepadan dengan kata etika serta moral. *Sila* dalam agama Buddha tercermin dari ucapan, perbuatan jasmaniah dan mata pencaharian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Buddha dalam *Cullavedalla Sutta* “Ucapan benar yang manapun, perbuatan benar yang manapun, dan mata pencaharian benar yang manapun kesemuanya itu disusun dalam kelompok *Sila*” (Rashid, 1996: 9).

Menurut agama Buddha, *Sila* merupakan dasar yang utama dalam pengamalan ajaran agama, dan merupakan langkah penting yang sangat utama untuk mencapai peningkatan bathin yang luhur. Hal ini seperti dijelaskan oleh Buddha dalam *Samyutta Nikaya* V (143): “Apakah permulaan bathin yang luhur? *Sila* yang sempurna kesuciannya” (Bodhi, 2009:16-17). Buddhaghosa dalam kitab *Visuddhimagga*, memberikan 4 penafsiran mengenai *Sila*, yaitu: (1) Menunjukkan sikap bathin atau kehendak (*Cetana*), (2) menunjukkan penghindaran (*Virati*), (3) Menunjukkan Pengendalian diri (*Samvara*) dan (4) menunjukkan tiada

pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan (*Avitikkama*) (Mukti, 2003:174).

Bhakti, merupakan rasa tunduk, setia dan hormat (Yasyin, 1997:49). Berbakti dapat diartikan sebagai sikap yang mencerminkan perilaku atau berlaku tunduk dan hormat. Dalam agama Buddha *Bhakti* merupakan salah satu cerminan *Sila* atau perilaku sebagai umat Buddha. Berbakti bukan tunduk dan menjalankan *Dharma* secara membabi buta, *bhakti* dalam agama Buddha merupakan sikap hormat kepada *Buddha*, *Dharma* dan *Sangha* serta para siswa Buddha, karena telah mengajarkan nilai-nilai Buddhisme kepada umat Buddha.

Agama Buddha memandang religiusitas sebagai aspek yang ada di dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain karena menafaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas kedalaman isi pribadi manusia, termasuk rasio dan rasa manusiawinya (Mangunwijaya, 1986:4). Jadi dapat dikatakan bahwa religiusitas lebih mendalam dari pada agama, karena agama lebih menunjuk pada kelembagaan kebaktian dalam aspek formal, ajaran termasuk tafsir kitab suci, peraturan atau hukum-hukumnya dan keseluruhan perangkat organisasi yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan.

Sikap mental religius menurut Mangunwijaya (1986:2) adalah cinta pada kebenaran, lurus, tidak munafik, tidak egois, tidak serakah, dan suka menolong. Sehingga jika ada orang yang rajin sembahyang, akan tetapi di dalam rumah masih menindas istri, diluar rumah menjadi seorang lintah darat, atau ada orang yang militan dalam kegiatan organisasi keagamaan namun mengobarkan kebencian dan permusuhan tentunya tidak dapat disebut sebagai orang yang religius.

Cita-cita religius Buddha seperti terdapat dalam *Majhima Nikaya* I 38-39 adalah melenyapkan penderitaan secara tuntas, yakni ketika seseorang terbebas dari belenggu nafsu, terbebas dari penyakit ketidaktahuan dan bebas dari kelahiran kembali yang disebut dengan *Nibbana*

atau *Nirwana* (Mukti, 2003:56). Lebih lanjut dijelaskan bentuk religiusitas adalah rasa *bhakti* sebagai penganut agama Buddha, sebagaimana dalam *Dhiganiyaya* I 140-141, dijelaskan bahwa ada 4 tempat yang dihormati dan layak untuk dikunjungi oleh mereka yang berbakti: (1) Tempat *Tathagata* dilahirkan, (2) Tempat *Tathagatha* mencapai penerangan sempurna, (3) Tempat *Tathagata* memutar roda *Dharma* pertama kalinya, dan (4) Tempat *Tathagata Parinirwana*. Tempat-tempat tersebut disucikan bukan karena memiliki nilai historis atau sejarah perkembangan agama Buddha, melainkan karena dengan mengunjungi tempat-tempat tersebut perasaan seseorang menjadi tentram dan damai.

Membahas tentang religiusitas maupun praktek keagamaan maka tidak akan terlepas dari beberapa hal, diantaranya.

1) Simbol Dalam Agama Buddha

Simbol secara etimologi berasal dari kata “*Symbolon*” yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang (Subiyantoro, 2010: 13). Simbol juga diartikan sebagai keadaan yang memimpin pemahaman subjek kepada objek, sehingga simbol pada umumnya memuat banyak arti, setidaknya dua arti. Simbol juga bisa berbentuk konkrit atau abstrak. Sehingga simbol hanya dapat dipahami oleh manusia saja.

Simbol diartikan sebagai pengantaran pemahaman terhadap objek (Triguna, 2000:9). Simbol bukan hanya tampak sebagai bentuk fisik atau isyarat, namun dapat pula berupa penggunaan kata-kata, dalam bentuk simbol suara. Menurut Cassirer simbol merupakan bagian dari dunia makna manusia yang berfungsi sebagai *designator*.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa alam dan manusia merupakan sebuah realitas, realitas tersebut ditangkap indra dalam bentuk pengalaman, pengalaman tersebut dapat berupa *Matter* (bahan-bahan) yang membentuk *Form* (Bentuk), dari sinilah kebudayaan tercipta yakni dari

Form yang membentuk simbol dapat berupa bahasa, mitos, religi, seni dan pengetahuan (Cassirer, 1953:10). Simbol berisi dunia makna karena berhubungan dengan bentuk konstruktif simbol. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa simbol tidak semata-mata bersifat ekspresif, kognitif dan evaluative. Melainkan juga berdimensi konstruktif-dunia makna.

Bahasa sebagai sumber dari seluruh kegiatan intelektual manusia. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, meskipun bahasa pada dasarnya bersifat metaforis, pada kenyataannya bahasa tidak mampu menggambarkan hal-hal secara langsung, namun lebih banyak menggunakan cara yang tidak langsung dengan istilah-istilah yang ambigu (Cassirer, 1979:182). Bahasa sebagai simbol verbal tidak hanya berupa konseptual, tetapi memiliki karakter intuitif, hal ini maka menjadikan bahasa sebagai ekspresi individual sehingga perlu persatuan dan dibuat pengalaman sistematis, sehingga ada bahasa ilmiah. Simbolisme bahasa bukan hanya semantik namun juga simbol estetika (Dewi, 2009:65).

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Cassirer, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya simbol dibedakan menjadi dua, yakni simbol verbal dan non verbal, setiap individu akan mengartikan simbol yang sama dengan arti atau makna yang berbeda, hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang mampu melihat simbol.

2) Mitos Dalam Agama Buddha

Mitos secara umum dikaitkan sebagai gejala kebudayaan manusia yang paling sulit untuk diterima secara logika. Karena mitos dianggap sebagai gagasan yang tidak koheren dan tanpa bentuk (Dewi, 2009:65). Lebih lanjut dikatakan bahwa mitos merupakan sesuatu yang memiliki makna rasional sesuai dengan kenyataan, mitos tidak memiliki karakter

permanen, meskipun pada dasarnya mitos mematuhi aturan yang ada (Cassirer, 1979:174).

Mitos secara semiologis merupakan sistem yang khas yang dikonstruksikan dari sistem semiologis tingkat pertama. Mitos muncul dalam teks pada level kode, yakni suatu pesan yang mengandung ideologi (Barthes, 2017:9). Lebih lanjut dijelaskan bahwa mitos dan ideologi bekerja dengan cara mengalamiahkan penafsiran-penafsiran yang sebenarnya bersifat kontingen (sementara atau tidak tetap) dan secara historis bersifat spesifik (Barker, 2005:95).

Masih menurut Barthes (1972:155) mitos membuat pandangan dunia tertentu seolah-olah tidak dapat ditentang, karena itu alami atau itulah takdir Tuhan. Mitos memiliki fungsi sebagai pembenaran alamiah pada suatu intensi historis, membuat kesementaraan sebagai seolah-olah abadi. Membahas soal mitos, maka agama khususnya agama Buddha tidak terlepas dari mitos. Banyak aturan dan nilai-nilai atau ideologi yang didasarkan pada hukum karma, sehingga jika terjadi sesuatu peristiwa, sudah pasti ada hubungannya dengan perilaku atau perbuatan yang telah dilakukan pada masa lampau.

3) Ritual Dalam Agama Buddha

Ritual sering diidentikkan dengan kebiasaan (*habit*) atau rutinitas, Rothenbuhler dalam (Astuti, 2016:18) menguraikan bahwa “*ritual is the voluntary performance of appropriately patterned behavior to symbolically effect or participate in the serious life*”. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rothenbuhler, Couldry mendefinisikan ritual sebagai *habitual action* (aksi turun temurun), aksi formal dan juga mengandung nilai-nilai transendental. Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ritual merupakan suatu kegiatan yang memiliki pengaruh kepada masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut dan dilakukan secara turun temurun.

Ritual dalam tradisi agama-agama merupakan ekspresi perilaku masyarakat yang berhubungan langsung dengan dunia spiritual antara manusia dengan Tuhan (Ilahi, 2017:46). Ritual dapat diartikan sebagai bentuk pengalaman keimanan sekaligus pengalaman estetis yang mengandung nilai sakral dalam setiap upacara perayaan yang diselenggarakan secara rutin. Lebih lanjut Underhill menjelaskan bahwa ritual agama merupakan pola yang sesuai dengan gerakan ceremonial, bunyi-bunyian dan upacara verbal yang bersifat visual, yakni menciptakan bentuk yang dapat menggantikan atau berkaitan dengan tindakan religius (Underhill, 1962:40-41).

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap agama ataupun aliran kepercayaan yang ada dan berkembang di Indonesia dipastikan memiliki ritual yang diekspresikan dalam upacara verbal maupun bunyi-bunyian, sebagai contohnya dalam agama Buddha sebelum dilakukan *Pujhabakti*, akan dipukul tambur atau bel, sebagai simbol bahwa kegiatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya akan dimulai. Pola yang berkaitan dengan ritual biasanya bercirikan acara ceremonial yang dilakukan secara rutin dalam satu waktu dan tempat tertentu berdasarkan pengalaman keagamaan masyarakat. Dalam masyarakat Buddhis dikenal istilah *Pattidana* yakni ritual yang dilakukan oleh umat Buddha dengan tujuan mendoakan leluhur yang sudah meninggal. Dalam tradisi *Pattidana* ini ada pembacaan *Parita* suci, pelimpahan jasa dan tahapan ritual lainnya yang semuanya mengandung nilai mistis-spiritual.

Apapun bentuk ritual yang dilakukan di masyarakat pada dasarnya memperlihatkan sebuah sistem simbol yang berkaitan dengan kohesi sosial dan transformasi sosial dalam memperkuat ikatan emosional antar masyarakat yang beragama (Dillistone, 20012:22). Dalam tradisi keagamaan ritual tidak terlepas dari sebuah tindakan religius yang diintegrasikan dalam bentuk dan aktifitas peribadatan secara total, sebagai contohnya dalam setiap *pujhabakti* yang dilakukan oleh umat Buddha selalu mendoakan agar setiap makhluk hidup berbahagia, dengan

mendoakan kebaikan kepada makhluk lain, maka kebahagiaan juga akan terpecar pada diri orang yang mendoakan, segala perilaku yang demikian disebut sebagai upacara dalam bentuk ritual (Dhavmony, 1995:175).

Ritual yang dilakukan oleh masyarakat, tentunya memiliki tujuan, adapun tujuan dari ritual tersebut menurut (Turner, 1957:302) adalah: (1) ritual bertujuan untuk mereduksi bahkan menegasikan konflik sosial dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat, (2) ritual dapat mengatasi perpecahan dan memperkuat solidaritas antar masyarakat yang bersangkutan, (3) ritual dapat menyatukan dua prinsip yang bertentangan dan menciptakan keharmonisan dalam membentuk komunitas yang memberikan kesejukan hati dan ketenangan jiwa, dan (4) ritual dapat memberikan seseorang kekuatan dan motivasi baru yang berlipat ganda dalam menjalani kehidupan. Hubungan antara religiusitas dengan ritual menjadi sangat jelas, bahwa ritual yang dilakukan oleh masyarakat mencerminkan bagaimana religiusitas seseorang.

b. Majelis *Nichiren Shoshu*

Majelis *Nichiren Shoshu* merupakan salah satu majelis agama Buddha yang berkembang di negara Indonesia, sejarah menjelaskan bahwa *Nichiren Shoshu* adalah ajaran Buddha yang berasal dari negara Jepang sekitar tahun 1253 yang di prakarsai oleh Daishonin sebagai Buddha pokok yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Nichiren Daishonin. Seiring berjalannya waktu aliran *Nichiren* yang ada di Jepang mengalami perpecahan, aliran besar yang berkembang adalah *Nichiren Shoshu* yang murni dan *Sokka Gakai*.

Di Indonesia sendiri ada beberapa aliran Nichiren, seperti Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI), Majelis *Nichiren Shoshu* Indonesia (NSI), *Sokka Gakai*, dan *Visistakaritra*. Dari sekian majelis yang berkembang di Indonesia, hanya Majelis *Nichiren Shoshu* yang memiliki hubungan langsung pembinaan dengan

Bhikkhu tertinggi turun temurun, hal ini seperti ditulis oleh Macwilliams, yang menulis tentang kontroversi mandala pemujaan *Gohonzon* di internet (2006:91):

The “True” sect was originally founded at Taiseki-ji near Mt. Fuji by one of Nichiren’s early disciples, Nikkō Shōnin, now has six American temples led by priests and supported by perhaps 1,800 lay members mainly from the Asian-American community. Hurst 1998, 80-81, 85. Hurst 1992, 167-68. Lay supporters are organized into support groups called Hōkkekō.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sekte yang sesungguhnya atau sekte sejati didirikan di Taisekiji, sekarang sudah berkembang di seluruh dunia, salah satunya di Amerika Serikat yang memiliki 6 (enam) kuil yang dipimpin oleh *Bhikkhu* dengan pengikut yang berjumlah lebih dari 1.800 an orang. Sehingga *Nichiren Shoshu* sejati yang tersebar diseluruh dunia, memiliki hubungan darah pembinaan secara langsung dengan Kuil Pusat Taisekiji.

Metraux menulis tentang “*The Dispute Between The Soka Gakkai And The Nichiren Shoshu Priesthood: A Lay Revolution Against a Conservative Clergy*” (Metraux, 1997:325-336). Dalam tulisannya Metraux menjelaskan bahwa *Soka Gakkai* sebagai organisasi umat Buddha di Jepang mengalami konflik dengan *Bhikkhu* kuil Pusat Taisekiji pada tahun 1990. Konflik yang muncul didasarkan pada konflik mengenai tulisan Buddha Nichiren Daisyonin yakni *Gohonzon* bukanlah imamat, dan tidak bisa mewakili otoritas tertinggi. Prinsip bahwa pencapaian kesadaran Buddha dapat dicapai tanpa bantuan seorang *Bhikkhu*. Sedangkan *Bhikkhu* tertinggi turun temurun memiliki prinsip menjaga *Dharma* ajaran Buddha dengan tidak meninggalkan amanat dari Buddha Nichiren Daisyonin.

Majelis *Nichiren Shoshu* adalah salah satu Majelis agama Buddha yang berasal dari negara Jepang. Adapun Buddha pokok yang mengajarkan ajaran Buddha *Nichiren* adalah Nichiren Daisyonin. Dalam sejarah dijelaskan bahwa agama Buddha masuk ke Jepang pada abad 6

M, yang dibawa oleh utusan kerajaan Paekche, yakni salah satu kerajaan di Semenanjung Korea. Pada abad ke 13 M agama Buddha di Jepang mengalami fenomena dengan lahirnya banyak sekte dan aliran, yang bukan hanya bergelut dalam kehidupan keagamaan tetapi juga turut mewarnai kehidupan politik (Wanandar, 1994:19).

Buddha Nichiren Daisyonin lahir pada tanggal 16 Februari 1222, sebagai anak seorang nelayan atau rakyat jelata di desa kecil Kominato, Provinsi Awa sekarang lebih dikenal dengan daerah Ciba. Dengan nama kecil Zennichi Maro, sejak usia 12 tahun sudah meninggalkan keluarganya untuk belajar di kuil dan menjadi seorang *Bhikkhu* pada usia 16 tahun dengan nama Zesho-bo Renco (Wanandar, 1994:19). Keinginan untuk terus meneruskan belajar *Dharma* ajaran Buddha dijalani oleh *Bhikkhu* Renco dengan belajar kepada banyak guru dan keluar masuk kuil, hingga pada tanggal 28 April 1253 Barulah Hukum *Namyohorengekyo* dikumandangkan untuk yang pertama kali dihadapan banyak orang di kuil Seico. Dengan begitu secara resmi *Bhikkhu* Renco telah memproklamkan berdirinya sekte Nichiren yang dikenal sebagai *Nichiren Shoshu* dari mazhab Mahayana.

Di Indonesia, *Nichiren Shoshu* secara resmi lahir sebagai lembaga keagamaan Buddha pada tanggal 28 Oktober 1964, pada awalnya *Nichiren Shoshu* diperkenalkan oleh para pengusaha Jepang yakni sekitar tahun 1950 dari mulut kemulut, yakni kepada kenalan para pengusaha Jepang tersebut yang merupakan orang Indonesia asli. Pada awalnya pertemuan dan diskusi informal pembabaran *Dharma* dilakukan dari rumah-kerumah, hingga bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda diadakan pertemuan besar sekaligus diresmikan NSI (*Nichiren Shoshu* Indonesia) sebagai Majelis agama Buddha di Indonesia (Wanandar, 1994:43-45).

Tokoh utama yang memperkenalkan agama Buddha *Nichiren Shoshu* adalah Seno Soenoto, seorang militer pada masa perjuangan kemerdekaan. Seno Soenoto kemudian menikah dengan warga Jepang

yang bernama Keiko Sakurai, setelah perang dunia berakhir, Seno Soenoto tidak lagi sebagai seorang anggota militer, tetapi memilih untuk menjadi seorang pengusaha (Senosoenoto, 1995:14-17). Dibawah kepemimpinan Seno Soenoto *Nichiren Shoshu* mengalami pasang surut, tergabung dalam wadah WALUBI (Perwalian Umat Buddha Indonesia) hingga mengalami perubahan nama lembaga.

Masa perkembangan agama Buddha *Nichiren Shoshu* Indonesia dibagi dalam beberapa tahap atau era (Wanandar, 1994:42-88),

- 1) Era pengenalan yakni pada tahun 1965-1971, selaras dengan lahirnya Orde Baru, dimana agama resmi di Indonesia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Pada masa inilah NSI sebagai lembaga keagamaan Buddha mulai memperkenalkan dirinya kepada masyarakat melalui pola pembinaan keyakinan (*Sraddha*) maupun dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat luas
- 2) Era pembuktian identitas 1972-1979. Adanya masalah yang timbul yakni berkaitan dengan pokok permasalahan yang harus dijawab terkait “Agama Buddha NSI adalah agama Jepang” serta “Agama Buddha NSI adalah agama Buddha eksklusif agama keturunan Cina. Pada masa ini pimpinan NSI sering dipanggil oleh aparat pemerintahan untuk dimintai keterangan. Adanya tantangan tersebut justru menjadikan NSI semakin aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, sebagai buktinya pada tahun 1976 NSI turut serta dalam musyawarah intern umat beragama di Jawa Timur, pada tahun 1977 mengikuti mempelopori berdirinya MAABI dan Seno Soenoto ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral
- 3) Era Pembentukan fondasi 1980-1987, yakni masa dimana NSI memfokuskan perjuangan untuk memantapkan lebih lanjut sebagai agama Buddha yang memiliki komitmen terhadap tanah air Indonesia. Dengan menjalankan berbagai program sosial keagamaan seperti kegiatan donor darah, kerjabakti di taman makam pahlawan,

- reboisasi dan lainnya. Pada masa ini juga mulai dibangun Vihara di kompleks Megamendung Bogor sebagai tempat untuk belajar Dharma
- 4) Era terbentuknya lembaga keagamaan 1988-sekarang. Pada masa ini NSI mengokohkan keberadaanya sebagai lembaga agama yang memiliki nilai-nilai universal, mutlak serta kekal abadi. Pada tanggal 6 Januari 1993 Seno Soenoto sebagai pimpinan NSI di Indonesia kembali ke alam semesta, setelah ditinggalkan oleh seorang pemimpin yang agung, tidaklah menjadikan NSI sebagai majelis agama Buddha kehilangan arah perjuangan. Hingga pada tanggal 15 Desember 1993, *Sangha* kuil pusat memberikan mandat kepada Nyonya Keiko Seno Soenoto sebagai penanggung jawab tertinggi ajaran agama Buddha *Nichiren Shoshu* di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Majelis *Nichiren Shoshu* pada penelitian ini adalah lembaga keagamaan Buddha dengan nama Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma Indonesia dibawah kepemimpinan ketua umum Herwindra Aiko Seno Soenoto pada tahun 2019, perkembangan majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma khususnya di Provinsi Jawa Tengah selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam pada Bab IV Disertasi ini.

3. Kehidupan Beragama

Negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang diyakini. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mengingat bahwa warga negara Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, multikultural, dan bhineka. Karena adanya perbedaan tersebut maka perlu adanya pengakuan atas keberagamaan tersebut, salah satu keberagamaan yang dimaksud adalah keberagamaan dalam hal kepercayaan kepada Tuhan atau agama (Mustafa, 2006:130).

Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, selanjutnya juga pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Fidiyani, 2013:439). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak beragama yakni memeluk dan menjalankan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang bukanlah hak yang dapat dilaksanakan sesuka hati. Artinya ada rambu-rambu atau syarat bahwa dalam menjalankan hak tersebut tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum serta keamanan bangsa dan negara.

Di Indonesia kebebasan beragama, diartikan kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Adapun agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Kehidupan beragama di Indonesia dapat dijelaskan bahwa masing-masing pemeluk agama tersebut saling menghormati, saling menghargai dan mengembangkan toleransi agar tercipta perdamaian sesama pemeluk agama. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan beragama bukan hanya pada tataran simbol. Tetapi seharusnya pada tataran substansi nilai-nilai ajaran agama.

Dijelaskan bahwa secara normatif-doktrinal semua agama mengajarkan kedamaian, persaudaraan serta kerukunan individu dan kelompok, sehingga tidak ada satupun agama yang menghendaki terjadinya konflik ataupun permusuhan (Digdoyo, 2018:42-60). Pada prakteknya, kehidupan beragama berarti menjalankan kehidupan dengan dasar ajaran agama, yakni mengutamakan kedamaian dan kerukunan diantara umat beragama.

Pada dasarnya kehidupan beragama menunjukkan dua hal, yang pertama manusia berelasi dengan Tuhan yang mutlak, yakni Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup dan manusia berelasi dengan sesama manusia serta alam semesta ciptaan Tuhan. Selanjutnya relasi manusia dengan Tuhan

disebut sebagai relasi vertikal dan relasi manusia dengan manusia dan alam ciptaan Tuhan disebut sebagai relasi horisontal (Sukmana, 2014:179-190).

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kehidupan beragama adalah, bagaimana umat Buddha Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma Indonesia membangun relasi dengan Tuhan-nya serta relasi dengan sesama umat Buddha yang tergabung dalam Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma serta relasi antara sesama umat Buddha dan umat Buddha diluar lembaga Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma serta relasi antara Umat MNSBDI dengan masyarakat secara umum.

C. Landasan Teori

1. Teori Hegemoni

Gramsci mengembangkan teori hegemoni, atas dasar dekonstruksi Gramsci terhadap konsep Marxis ortodoks, yaitu konsep yang memandang bahwa doktrin Marx sebagai kebenaran mutlak. Gramsci sebagai ilmuwan menganggap Marx sebagai sumber inspirasi untuk melakukan dekonstruksi (Ratna, 2005:181). Pada dasarnya prinsip hegemoni Gramsci mengandung gagasan untuk melakukan perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Dalam hal ini hegemoni Gramsci berarti menolak konsep yang menjunjung tinggi kebenaran mutlak, baik yang terkandung dalam Marxisme maupun non Marxisme (Patria dan Andi, 2003:98).

Teori hegemoni bukan hal baru dalam tradisi Marxis, namun ada perbedaan hegemoni Gramsci dengan istilah serupa yang ada sebelumnya. Yakni Gramsci menerapkan konsep hegemoni lebih luas bagi supremasi satu kelompok atau lebih atas lainnya dalam setiap hubungan sosial. Sedangkan istilah hegemoni yang dipakai sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. Selanjutnya menurut Femia (1983: 327-364) Gramsci mengkarakterisasikan hegemoni dalam istilah pengaruh kultural, tidak hanya kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Gramsci bahwa teori Marxisme mengakibatkan adanya kecenderungan dikalangan kaum buruh untuk lebih menjadi pasif, pasif disini berarti kaum buruh hanya menanti adanya perubahan dalam bidang ekonomi, yang jelas-jelas sikap tersebut mengakibatkan terhambatnya kemunculan ide-ide ataupun inisiatif baru. Sehingga diperlukan kewaspadaan serta kesadaran manusia agar tidak terjebak dalam permainan yang dimainkan oleh penguasa dominan (Ratna, 2005:180-182).

Pembentukan opini publik, merupakan hal yang paling penting dan sentral dalam teori hegemoni Gramsci. Dijelaskan pula bahwa untuk membentuk adanya opini publik, maka yang paling mendasar adalah membentuk ruang publik, dalam bentuk institusi formal, informal maupun nonformal. Ruang publik tersebut yang digunakan untuk mengembangkan dan menyebarkan ideologi hegemonik. Institusi dan strukturnya oleh Gramsci disebut sebagai alat hegemoni. Dalam penelitian ini tentunya Majelis *Nichiren Shoshu* Buddha Dharma sebagai lembaga keagamaan Buddha berperan sebagai alat untuk mensosialisasikan dan mempertahankan ideologi hegemonik (Patria dan Andi, 2003:127).

Pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam kontrol sosial politik, menjadi dasar lahirnya teori hegemoni. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukkan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999:31).

Hegemoni menurut Gramsci dibentuk oleh tiga istilah pokok yang mengidentifikasi bidang-bidang yang berbeda, tapi saling berhubungan.

Ketiga bidang tersebut meliputi: Perekonomian, Negara dan Masyarakat Sipil (Bocock, 2011:34-35). Perekonomian menyangkut tentang kelas-kelas yang dikaitkan dengan kepemilikan sarana Produksi, negara berhubungan dengan sarana kekerasan (polisi dan militer) dan suatu wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat sipil, didalamnya termasuk lembaga atau organisasi religius. Dalam penelitian ini Majelis *Nichiren Shoshu* termasuk dalam masyarakat sipil, karena merupakan lembaga atau organisasi keagamaan.

Menurut pandangan Gramsci, hegemoni dalam pengertian kepemimpinan intelektual dan filosofis harus secara aktif di produksi, dan dalam praktiknya tidak harus memperoleh kekuasaan di negara terlebih dahulu. Sehingga untuk memahami sudut pandang hegemoni Gramsci secara layak, sangat penting untuk mempertahankan pemikiran bahwa hegemoni didasarkan pada masyarakat sipil yang dalam penelitian ini adalah Majelis *Nichiren Shoshu* sebagai lembaga religius (Bocock, 2011:128).

Penelitian ini menggunakan alat hegemoni dalam teori hegemoni Gramsci sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan bentuk gerakan keagamaan pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah. Dalam konteks ini Majelis *Nichiren Shoshu* sebagai salah satu Majelis agama Buddha yang berkembang di Indonesia, pernah mengalami keadaan pahit. Dimana tidak diakui keberadaannya, bahkan pernah dianggap sebagai agama Buddha yang sesat dan dikeluarkan secara sepihak dari WALUBI. Adanya hegemoni dari WALUBI, membuat Majelis *Nichiren Shoshu* untuk berusaha menyetarakan posisinya sebagai bagian dari agama Buddha dengan melakukan berbagai gerakan keagamaan.

Dalam gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah, ideologi menjadi hal yang sangat penting. Penting karena dalam membangun sebuah gagasan tidak dapat terlepas dari adanya dasar ideologi. Sebagai alat hegemoni, Majelis *Nichiren Shoshu* sebagai lembaga formal tentunya menjadikan kelompok intelektual sebagai bagian penting terjadinya tindakan kolektif yang disebut sebagai gerakan keagamaan, karena pada dasarnya hegemoni mengandung makna kepemimpinan intelektual dan moral. Dalam

penelitian ini dasar pemikiran Seno Soenoto sebagai aktor pemimpin intelektual dan moral memiliki pengaruh yang sangat besar dalam gerakan keagamaan yang terjadi pada Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah.

Gramsci memilah menjadi dua mengenai kaum intelektual tersebut, yakni kelompok intelektual organis dan kelompok intelektual tradisional. Kelompok intelektual organis yang terbentuk secara organis, dan merupakan bagian dari institusi perjuangan kelas, yang memihak pada kelas yang tertindas. Tentunya memiliki peran yang lebih besar dalam membangun dan menumbuhkembangkan semangat perjuangan kelas. Sehingga kelompok intelektual organis mampu menjadi motor penggerak dalam sosialisasi ideologi massa rakyat (Simon, 2000:144).

Hegemoni bagi Gramsci merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lainnya. Kelas hegemonik merupakan kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas lainnya dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui persetujuan politik dan ideologis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa teori hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci merupakan sebuah pandangan hidup dan cara berpikir dominan yang didalamnya mengandung konsep yang disebarluaskan kepada masyarakat, baik secara individual maupun kelompok atau institusional. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, serta kelas bawah aktif mendukung ide yang diberikan oleh kelas dominan. Sehingga kekuasaan yang dilakukan bukan dengan kekerasan tetapi secara lembut dan halus dalam bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai (Simon, 2000:101).

Kekuasaan menurut Foucault (1997: 113-114) dipahami sebagai bermacam hubungan kekuatan, yang imanen dibidang hubungan kekuatan itu berlaku dan merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya. Kekuasaan yang kedua dipahami sebagai permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah, memperkokoh dan memutarbalikinya. Kekuasaan yang ketiga dipahami sebagai hubungan kekuatan yang saling mendukung, sehingga membentuk rangkaian atau

sistem, atau sebaliknya kesenjangan dan kontradiksi yang saling mengucilkan. Dan kekuasaan diartikan sebagai strategi tempat-tempat hubungan kekuatan berdampak dan atau kristalisasinya dalam lembaga terwujud dalam perangkat negara.

Dalam konsepsinya tentang kuasa, Foucault menghindari pemaknaan yang negatif atas kuasa. Sehingga menurut Foucault kuasa itu menyebar, tidak terpusat pada seseorang atau institusi (Adlin, 2020: 18). Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kuasa menyebarkan hubungan-hubungan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh (Haryatmoko, 2002: 12) bahwa kekuasaan memberi struktur kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat dan bersifat dinamis atau rentan terhadap perubahan. Hal ini disebut juga sebagai institusionalisasi kekuasaan yakni keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan-aturan sosial yang melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan.

Foucault juga menggunakan istilah Rezim kebenaran. Kebenaran tidaklah berada diluar kuasa atau kurang akan kuasa. Bertentangan dengan mitos yang sejarah dan fungsinya akan menuntut kajian lebih jauh, kebenaran bukanlah ganjaran dari jiwa yang bebas. Kebenaran adalah sesuatu yang ada didunia ini, kebenaran berdasarkan beranekaragam bentuk terbatas serta mencakup efek-efek yang tetap dari kuasa (Foucault, 1977: 131). Dalam penelitian ini berbagai kebenaran yang diyakini oleh umat Buddha yang tergabung dalam lembaga keagamaan Buddha yang disebut WALUBI dapat melanggengkan dominasi WALUBI terhadap majelis agama Buddha yang adadi Indonesia.

Gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah, merupakan bentuk perjuangan Majelis *Nichiren Shoshu* sebagai lembaga keagamaan Buddha yang memiliki keinginan untuk menjadi setara dengan majelis agama Buddha lainnya. Pengalaman pernah dianggap sebagai agama sesat dan bukan bagian dari agama Buddha, serta pengalaman pernah dikeluarkan dari WALUBI sebagai organisasi keagamaan Buddha yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan membuat Majelis *Nichiren Shoshu*

terus berupaya membuktikan identitasnya sebagai bagian dari agama Buddha di Indonesia

Melalui gerakan sosial keagamaan pada majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah, maka terjadilah perubahan inheren baik secara ritual agama maupun sosial keagamaan, perubahan juga terlihat dari lahirnya berbagai ide ide baru tentang praktik dan bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan Buddha. Dengan demikian maka cara kerja teori hegemoni Gramsci ini relevan untuk mengungkap fenomena gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam kesetaraan kehidupan beragama Buddha di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

2. Teori Dekonstruksi

Membicarakan tentang dekonstruksi maka, tidak akan lepas dari Derrida, *Derrida seeksto deconstruct the epistemological base of Western philosophy, including the ideathat there can be any self-present transparent meaning outside of 'representation'.He also deconstructs the hierarchical conceptual oppositions of philosophy such asspeech/writing, reality/appearance, and argues for the 'undecidability' of binaryoppositions.* (Barker 2004:49).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pitana (2010:34-36), bahwa pemikiran Derrida pada dasarnya menolak tiga tradisi berpikir strukturalis, yakni: Logosentrisme, falosentrisme dan oposisi biner. Logosentrisme merupakan tradisi berpikir barat (strukturalisme dan modernisme) yang menganggap akal, pikiran, logos sebagai pusat kebenaran, sehingga segala realitas yang ada merupakan representasi dari akal, pikiran dan logos tersebut. Sedangkan falosentrisme merupakan cara pandang berpikir barat yang berpijak pada tatanan maskulin dan klaimnya bahwa yang maskulin itu bersumber pada diri sendiri dan merupakan agensi yang utuh. Akibat dari keperpijakan pada tatanan maskulin tersebut menjadikan kategori feminin sebagai sesuatu yang disingkirkan secara konstitutif dalam filsafat dan menjadikan perempuan bukan suatu esensi pada diri sendiri, melainkan apa yang dibuang (Barker, 2005:308-309). Mengenai penolakan pada oposisi biner dengan sendirinya

menciptakan tradisi berpikir barat dalam hal ini struktualisme dan modernisme bersifat sentral sekaligus dominasional, oposisi binner ditolak karena realitas sesungguhnya tidak dapat ditentukan dan dipastikan sebagai sesuatu berada dalam kategori dualitas belaka. Derrida menyatakan bahwa ada realitas-realitas lain yang tidak dapat ditentukan melalui dualitas tersebut. Realitas adalah tidak dualitas dikotomis, melainkan pluralitas posisi (Lubis, 3004:107-108).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa gagasan Derrida mengenai pusat dan struktur sebagai sesuatu yang ketat dan pasti, merupakan wawasan artifisial, artinya apa yang disebut sebagai pusat pada dasarnya dapat menghadirkan pusat-pusat lain yang membuka berbagai kemungkinan baru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa reformasi, pernah dihubungkan dengan konsepsi tentang pembaharuan dalam bidang ideologi keagamaan bukan hanya berhubungan dengan sistem pemerintahan, disisi lain dapat juga dihubungkan dengan hujatan kepada pemerintahan yang korup melalui demonstrasi. Perbedaan konsep tersebut menunjukkan adanya kondisi *difference* yang memicu terjadinya dekonstruksi.

Klages (2001:212) menginterpretasikan dekonstruksi Derrida dalam sistem kepercayaan religius kaum puritan. Menurut kaum puritan, Tuhan adalah pusat dari segalanya, semua yang terjadi di dunia semua atas kehendak Tuhan, bahkan hukum dan norma yang dibuat untuk mengatur hidup manusia harus mengacu kembali kepada Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, Derrida berpendapat bahwa pusat adalah bagian yang aneh, disatu sisi merupakan bagian dari struktur tetapi disisi lain bukan bagian dari struktur. Dekonstruksi Derrida dalam penelitian ini tidak terlepas dengan reformasi agama. Dimana reformasi agama diartikan sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Pada penelitian ini Seno Soenoto sebagai pendiri dan tokoh Majelis *Nichiren Shoshu* melakukan gerakan keagamaan untuk melakukan pembaharuan. Sehingga sangat tepat jika teori Dekonstruksi Derrida digunakan sebagai pisau analisis disertasi ini.

Teori Derrida dalam penelitian ini memiliki kedudukan sebagai teori utama guna melakukan analisis. Yang pertama untuk menganalisis bentuk gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dimana menurut Derrida realitas ciptaan (produksi, konstruksi) atau diciptakan kembali (reproduksi, rekonstruksi). Dan yang kedua dalam istilah konstruksi realitas merupakan konstruksi realitas baru sebagai hasil dari konstruksi realitas sebelumnya yang didekonstruksi (Piliang, 2003:14).

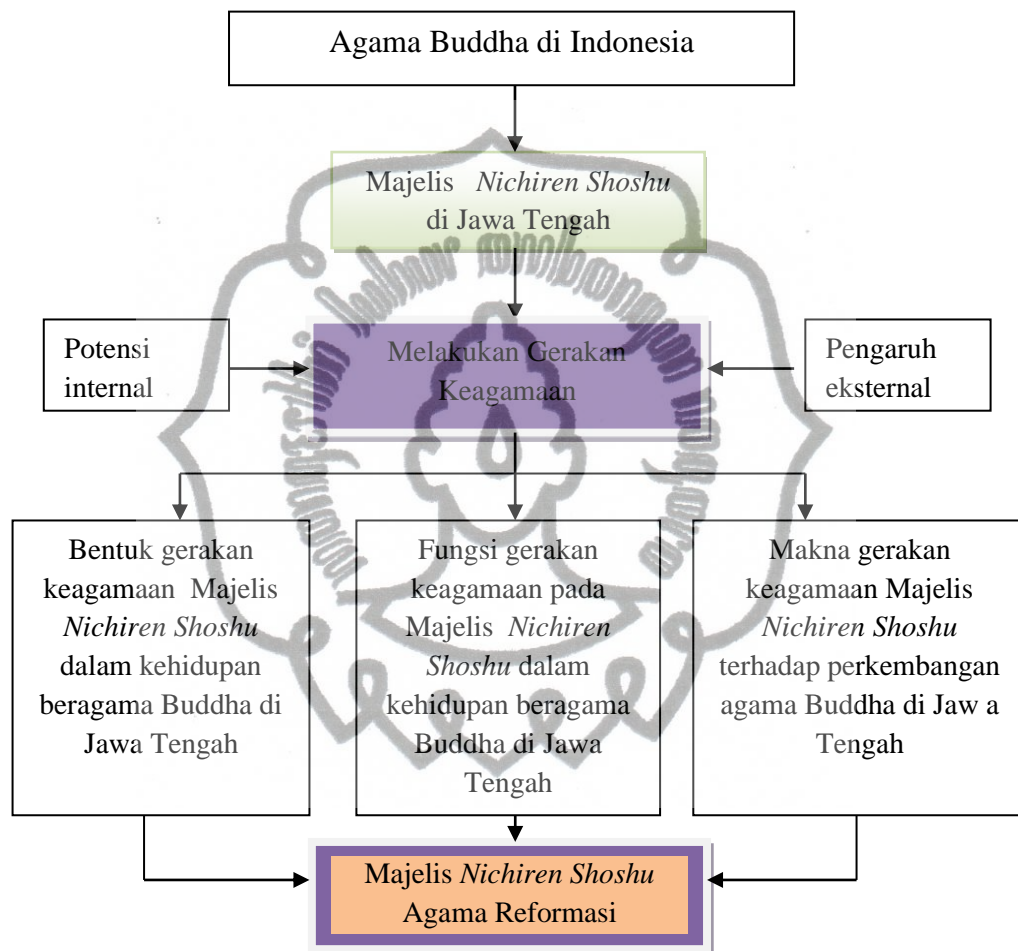
Menurut Derrida, menafsirkan teks itu diperbolehkan meskipun dalam bentuk pengulangan, karena tafsir sebuah teks itu bebas dan tidak terbatas (Derrida, 1976: 67; Romlah, 2019: 186). Lebih lanjut dijelaskan bahwa teks pada dasarnya tidak memiliki batas yang jelas dengan konteks diluar teks (Fang, 2017: 136). Derrida mengatakan bahwa: *“a text is not finished orpus of writing, some content enclosed in a book or its margins, but a differential network, a fabric of traces referring endlessly to something other than itself to other differential traces. Thus the text overruns all the limits assigned to it”* (Bloom, 1979: 84) berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa teks pada dasarnya melebihi semua batasan yang ditetapkan pada teks itu sendiri.

Guna menemukan realitas yang sebenarnya, dekonstruksi memiliki tiga konsep teoritis, (Ratna: 2005:250-275) yakni: *Traces* (jejak-jejak), *present-abscent* (kehadiran dan ketidakhadiran) dan *differance* (penangguhan). Dekonstruksi pada analisis pertama dengan menekankan pada kehadiran dan ketidakhadiran serta penangguhan dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami bentuk gerakan keagamaan majelis *Nichiren Shoshu* dengan membongkar praktek religi yang dilakukan oleh umat Buddha Majelis *Nichiren Shoshu*.

Selain itu dekonstruksi Derrida juga digunakan untuk menganalisis fungsi dari gerakan keagamaan, dengan mengedepankan teori dekonstruksi yang memandang realitas adalah sesuatu yang bersifat organik dan *decentering*. Organik berarti pemikiran yang memandang bahwa segala sesuatu jaringan saling berhubungan, sehingga Derrida menekankan bahwa sekecil apapun jaringan adalah sebuah entitas (Ratna, 2004:44). Sementara itu

decentering adalah struktur tanpa pusat dan tanpa hierarki. Dekonstruksi dalam cara kerjanya dengan memahami dan mengkaji segala sesuatu yang dianggap kurang penting.

D. Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Alur pikir yang melandasi model penelitian adalah sebagai berikut.

1. Agama Buddha di Indonesia sebagai teks agama yang otentik, meliputi aspek ritual, moral, dogma dan kelembagaan dipraktikkan dalam religiusitas umat Buddha di Indonesia.
2. Majelis *Nichiren Shoshu* sebagai salah satu majelis agama Buddha yang berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Merupakan bagian dari Agama Buddha di Indonesia yang melakukan suatu gerakan keagamaan. Gerakan

sosial keagamaan yang dilakukan bertujuan untuk membangun identitas Majelis sebagai bagian dari agama Buddha di Indonesia, yang setara dengan majelis agama Buddha lainnya.

3. Gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Majelis *Nichiren Shoshu* dipengaruhi oleh potensi internal yang dimiliki oleh Majelis, serta dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar Majelis *Nichiren Shoshu* baik dari Majelis agama Buddha lainnya, organisasi keagamaan WALUBI, pemerintah maupun masyarakat yang hidup berdampingan dengan umat Buddha Majelis *Nichiren Shoshu* di Jawa Tengah. Selanjutnya secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengungkap bentuk gerakan sosial keagamaan dan fungsi gerakan keagamaan Majelis *Nichiren Shoshu* dalam kehidupan beragama Buddha di Indonesia serta maknanya terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia.
4. Berdasarkan sajian dan analisis data dapat dijelaskan bahwa pergerakan keagamaan yang dilakukan oleh majelis *Nichiren Shoshu*, merupakan bentuk adanya reformasi yang dilakukan oleh Seno Soenoto sebagai tokoh dan pendiri *Nichiren Shoshu* di Indonesia.